

DAFTAR PUSTAKA

- Afrikal. (2017). *Tindak Pidana Perbarengan (Concursus) Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Bukhari, I. A. A. M. bin I. (n.d.). *Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibnu Jauzi Mesir.
- Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Si Pansos) di Indonesia : Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Hukum Pidana Islam* (cet ke-II). Sinar Grafikac.
- Ali, Zainuddin. (2019a). *Metode Penelitian Hukum* (1 cetakan). Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2019b). *Pengantar Hukum Pidana Islam* (1st ed.). Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Ali, Zainudin. (2012). *Hukum Pidana Islam* (Tarmizi (ed.); 1 cet 3). Sinar Grafika.
- Alifi, N. (2016). *korupsi dalam pandangan alqur'an*.
- An-Naisaburi, I. A. H. M. bin A.-H. (n.d.). *Shahih Muslim*. Addarul Alamiyah Mesir.
- Andika, K. (2022). *Pandemi Covid-19 dan Tindak Pidana Pencurian dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Apriyani, R. (2017). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 7(2), 17–40.
- Asmara, S. (2021). *Fenomena Ghasab Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Tinjauan Patologi Sosial)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- At Tirmidzi, M. I. (1998). *Sunan at Tirmidzi*. Dar al Gorb al Islami.
- Auliana, S. (2017). *Sanksi Pidana Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Konsep Darurat dan Maslahat Dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*. Gaya Media Pratama.
- Azhar, H. (2019). Pemberatan Pidana Terhadap Residivis dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 382–405.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

- Birahmat, B. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Al-Quran. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 66–85.
- Chasen, S. (2018). Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 144–163.
- Daipon, D. (2021). Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 137–150.
- Daroini, M., & Hamidah, T. (2021). Musibah dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maudu'i). *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 10(2), 203–222.
- Djuharnaedi. (2019). Pendidikan Kejujuran dalam Perspektif Hadits dalam Kitab Shahih Muslim (Kajian Materi dan Metode Pembelajaran). *Al Qalam*, 07(No 2).
- Ernawati. (2016). Wawasan Al- Qur ' an Tentang Hukum. *Lex Jurnalica*, 13(2).
- Fahri, H. (2018). Dilema Hukum Pidana Islam Di Era Modern; Had Al-Sariqah Perspektif Ulama Salaf Dan Ulama Kontemporer. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 215–236.
- Fasaludin, A. (2019). *Peradilan In Abseta Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Fawaid, M. W. (2016). Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 65–71.
- Fazli, M. (2020). *Dampak Perubahan Sanksi Hukum bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Menurut Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Gazali, A. (2017). Sanksi Pidana (Islam) Dalam Perspektif Filsafat Dakwah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(31), 49–54.
- Hanbal, I. A. bin M. bin. (1993). *Musnad Imam Ahmad*. Dar al Ihya' al Turath al 'Arabi.
- Haryono. (2016). Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(07), 429–450.
- Hasibuan, J. A. (2018). *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perbarengan (Concursus) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

- Hazrina, N. (2019). *Penafsiran Qishas Dalam Tafsir Firdaws Al-Naim Karya Thaifur Ali Wafa (Surah Al-Baqarah 178-179)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Herawati, W. P., & Hidana, A. R. (2020). Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan). *Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, 3(1), 73–90.
- Heriansyah. (2018). Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan oleh Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp). *Qiyas*, 3(2), 254–265.
- Hilinder, R. D. (2017). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Idami, Z. (2015). Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 20–43.
- Iksan, M., Setiawan, W. T., & Fitriana, W. (2022). *Reformulasi Peraturan Tentang Tindak Pidana Korupsi Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila*. 133–145.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021. [Www.Antikorupsi.Org. https://www.antikorupsi.org/id/category/tren](https://www.antikorupsi.org/id/category/tren)
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.
- Jahroh, S. (2011). Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2).
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Teraju: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 3(2), 71–80.
- Jumali, E. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 16(2), 113–124.
- Kumampung, M. R. (2020). Sistem Pemidanaan Dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak. *Lex Crimen*, IX(1), 120–128.
- Launa, & Lusianawati, H. (2021). Potensi korupsi dana bansos di masa pandemi covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2 (1), 1–22. 2721-6306

- Lestari, P. I. (2020). *Perilaku Ghasab Sebagai Budaya di Pesantren*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Maghfiroh, A. (2019). *Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Makinuddin. (2019). Tobat bagi Pelaku Tindak Pidana HIraBah dalam Alquran (Kajian Surat Al-Maidah: 33-34). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 311–337.
- Mardani. (2008). Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2), 239–259.
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Jauhari (ed.); 1st ed.). Rafah Press.
- Marzuki, I. (2019). Lembaga Keagamaan, Pancasila Dan Strategi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Yuridis*, 5(2).
- Maulana, M., Yuhermansyah, E., & Dewi, S. (2022). Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn). *Jurnal Justisia*, 7(1), 188–199.
- Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 43–67.
- Mawardi, A. I. (2018). *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Holilurrohman & Harisudin (eds.)). Pustaka Radja.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 223–230.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.); 1st ed.). Mataram University Press.
- Muhlisina, S. (2012). *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Musoli. (2018). Maqasid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At-Turus*, V(1), 60–82.
- Musthofa, A. B. (1993). *Tarjamah Shahih Muslim Jilid III* (1st ed.). CV. Asy Syifa'.
- Muzakir, K. (2022). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 33–46.
- Nafi, A. (2009). *Pendidikan Antikorupsi (Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum*

Pendidikan Agama Islam (PAI) Atas Pendidikan Antikorupsi. 65–115.

- Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103.
- Pambudi, D. A. (2022). *Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bantuan Sosial Pada Masa Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Pramesi, N. A. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Menghadapi Wabah Covid-19. *Studi Islam*, 16(1), 1–11.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (No. 31).
- Presiden Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (No. 20).
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 1(1), 30–41.
- Purwanto, Y., & Fauzy, R. (2017). Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(2), 127–140.
- Putra, P. A. A. (2015). Analisis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau dari Konsep Ta'zir dan Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Pidana Islam. *Scientica*, II(2), 48–64.
- Rahman, I. (2018). Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Panduan Konseling Behavioral Dengan Teknik Self Management Untuk Meningkatkan Kerja Keras Siswa*.
- Rahmatullah. (2021). Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 Dan Kaitannya Dengan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 19–27.
- Rasyidi, M. A. (2020). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2), 37–51.
- Rezki, A. F. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam*. Universitas Sumatra Utara.
- Ropei, A. (2021). Konsepsi Fiqh Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1), 25–46.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, 40(18), 117–130.

- Simanjuntak, A. D. (2019). *Hukum Meminta Uang Komisi (Al-Maks) Terhadap Supir Bus yang Menaikkan Penumpang di Luar Locket Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus: Jl. Sisimangaraja, Kecamatan Medan Amplas)*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Sudarti. (2020). Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. *Ahkam*, 8(1), 181–212.
- Sumampow, V. A. (2018). Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis*, VI(4), 101–112.
- Susanti. (2018). Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam. *UIB Repository*, 66–73.
- Susetyo, H. (2022). Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 240–260.
- Tantowi, W. (2021). Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 178.
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80–94.
- Usman, S., & Zikru, M. (2017). Pemberatan Hukuman terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 43–61.
- Utomo, S. B. (2003). *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Gema Insani Perss.
- Wibowo, A. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. In *Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Wibowo, N. K., Amut, G. S., & Lois, R. (2021). *Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Masa Pandemi*.
- Widyaningrum, T. (2011). *Pendekatan Konseptual dan Implikasi Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat*. Universitas Sebelas Maret.
- Wijanarko, D. S. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 2335–2348.
- Wijaya, A. (2017). *Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif Sariqah (Pencurian) Studi Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Plg*. Universitas Islam

Negeri Raden Fatah Palembang.

Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 156–174.

Yusdono, K. (2013). *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Darurat Dan Maslahat* [Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar].